



IMPELEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM MELALUI MADRASAH DI INDONESIA

Syahlarriyadi^{1*}

¹STAI Nida El-Adabi, Bogor

*Correspondence: andi.syahlar05@gmail.com

Abstract

The beginning of March 2020 was marked by the entry of Covid-19 into Indonesia which later became a Covid-19 pandemic marking various astonishing changes. Changes in various aspects of life such as social, religious, political, defense, and security science and technology are increasingly felt. This fact confronts a dilemmatic educational problem, where the quality of education which is the standard of national education quality is faced with an atmosphere of modernization and globalization, which is required to be able to play an active and dynamic role and be able to bring and contribute to the improvement of human morals, both at the theoretical and practical intellectual level. The problem of education in Indonesia tends to be oriented to the fulfillment of physical development needs through the preparation of human resources who have professional competence or are able to work professionally, it is time for Islamic education to reformulate holistic and integrative Islamic education with the vision of advancing Islamic civilization to be very important.

Keywords: *Implementation; quality of Islamic education; civilization*

Abstrak

Awal bulan Maret 2020 ditandai dengan masuknya covid-19 ke Indonesia yang kemudian menjadi pandemi covid-19 menandai berbagai perubahan yang mencengangkan. Terjadinya perubahan berbagai aspek kehidupan seperti sosial, agama, politik, Hankam dan Iptek semakin terasa. Kenyataan tersebut menghadapkan pada permasalahan pendidikan yang dilematis, dimana mutu pendidikan yang menjadi standar mutu pendidikan nasional dihadapkan pada atmosfer modernisasi dan globalisasi, dituntut untuk mampu berperan aktif dan dinamis serta dapat membawa dan berkontribusi bagi perbaikan moral manusia, baik dalam tataran intelektual teoritis maupun praktis. Permasalahan Pendidikan di Indonesia yang cenderung berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan fisik melalui penyiapan SDM yang memiliki kompetensi profesional atau mampu bekerja secara profesional, sudah saatnya pendidikan Islam mereformulasi pendidikan Islam secara holistik dan integratif dengan visi pemajuan peradaban Islam menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Implementasi; Mutu Pendidikan Islam; Peradaban

PENDAHULUAN

Awal bulan Maret 2020 ditandai dengan masuknya covid-19 ke Indonesia yang kemudian menjadi pandemi covid-19 menandai berbagai perubahan yang mencengangkan. Terjadinya perubahan berbagai aspek kehidupan seperti sosial, agama, politik, hankam dan iptek semakin terasa. Kenyataan tersebut menghadapkan pada permasalahan pendidikan yang dilematis, dimana mutu pendidikan yang menjadi standar mutu pendidikan nasional dihadapkan pada atmosfer modernisasi dan globalisasi dituntut untuk mampu berperan aktif dan dinamis serta dapat membawa dan berkontribusi bagi perbaikan moral manusia, baik dalam tataran intelektual teoritis maupun praktis.

Mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menekankan hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan, permasalahan mutu pendidikan menjadi isu strategis dan fundamental pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu melakukan berbagai upaya untuk menjamin dan mamajukan kesejahteraan umum dalam mencerdaskan bangsa.

Berbagai upaya dilakukan mulai dari kreatifitas dan inovasi membangun program pendidikan seperti penyempurnaan kurikulum, standar mutu pendidikan dan program pengembangan sumberdaya, baik sumberdaya manusia

maupun sumberdaya alam pendidikan dengan pola pengembangan secara terus-menerus (Republika.co.id, n.d.).

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Terbentuknya Indonesia sendiri tidak lepas dari Islam. Dimana beberapa kerajaan terdahulu menganut agama Islam serta pada masa memerangi penjajahan, para wali, kyai dan santri ikut berjuang merebut kembali tanah air (Adiwarman Karim, 2010). EMIS Kementerian Agama mengenai data statistik Pendidikan Agama 2019/2020, Data Statistik Pendidikan Islam 2019/2020, yang diambil dari Data Nasional Lembaga Pendidikan Islam di seluruh Indonesia mulai dari RA, MI, MTs, MA dan PTIS berjumlah total 82.418 Lembaga.

Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, Prof. Dr. Malik Fadjar mentabulasi permasalahan-permasalahan pendidikan Islam di Indonesia diantaranya adalah: *Pertama*, lemahnya wawasan kekinian dan masa depan, sehingga kemampuan memberi respon kepada tantangan dan tuntutan sangat miskin. *Kedua*, kebanyakan masih terbatas pada mempertahankan yang baik dari masa silam dan belum membuka diri untuk mengambil yang baru dan yang lebih baik (Ahmadi Syukran Nafis, 2012). Sehingga dari hal tersebut menimbulkan pemikiran-pemikiran konservatif terhadap hal-hal yang lebih baik pada era modernisasi dan globalisasi. Pendidikan formal maupun non formal merupakan salah satu kekuatan ampuh dan faktor strategis dalam membentuk serta mengembangkan budaya masyarakat menghadapi era tranformasi dan globalisasi.

Tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya adalah membentuk peserta didik agar mampu berkembang sebagai generasi "*Khairu Ummah*" (beriman dan bertaqwa, dewasa dalam bersikap, mentalitas, daya pikir dan semangat hidup mandiri, kreatif, dinamis, dan berakhlak karimah). Selain perencanaan yang baik dan tepat, menurut (Ahmadi Syukran Nafis, 2012). Pengembangan pendidikan Islam yang lebih arif juga perlu didukung oleh kegiatan "riset dan evaluasi".

Dalam kajian Abdullah Fajar (1991), riset dan evaluasi pendidikan merupakan dua jurus *empirical inquiry* yang dapat dijadikan landasan pengembangan secara baik.

Sementara itu menurut Muhib Abdul Wahab, n.d. Dosen Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN menjelaskan bahwa di Indonesia terjadi polarisasi yang cenderung dikotomistik antara tiga lembaga pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah. Dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta juga kerap kali memunculkan semacam kelas sosial dan kualitas tertentu. Pada saat yang bersamaan, sistem pendidikan di tanah air mengalami semacam despiritualisasi pelemahan dan penajuhan nilai-nilai spiritual dari konsep dan praktik pendidikan, sehingga pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan multicultural, dan sebagainya sulit terbangun dan dikembangkan.

Pendidikan Barat yang seringkali dinilai telah berkembang pesat dan maju cenderung tidak bervisi pemajuan peradaban, tetapi berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan fisik melalui penyiapan SDM yang memiliki kompetensi professional atau mampu bekerja secara professional. Karena itu, reformulasi pendidikan Islam holistik dan integrative (filsafat dan epistemology yang mendasarinya, tujuan dan visi misinya, pengembangan kurikulum, dan proses pembelajarannya) dengan visi pemajuan peradaban Islam menjadi sangat penting.

Berangkat dari uraian di atas, diketahui bahwa terjadi polarisasi yang cenderung dikotomistik antara tiga lembaga pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah. Selain itu, pendidikan masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan fisik melalui penyiapan SDM yang memiliki kompetensi professional atau mampu bekerja secara professional belum bertumpu pada Pendidikan Islam holistic dan integratif.

Kajian ini dapat disebut sebagai studi pustaka sebab peneliti menggunakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang

berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2016).

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan umum pasal 1, berisi bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Oleh karena itu, pendidikan agama di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua peserta didik mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Sedangkan untuk menjamin mutu Pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu, dalam peraturan tersebut, didefinisikan sebagai kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang sistemik terpadu tersebut dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, masyarakat, serta melibatkan dunia usaha (Prasko, n.d.).

Indonesia menjadikan akreditasi sebagai salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, dan manajemen mutu secara keseluruhan. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal, pada setiap jenjang dan jenis (Pasal 60 PP Nomor 19/2005) melalui pendekatan audit, pengukuran, dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menempatkan madrasah sejajar dengan lembaga pendidikan lain. Bukan saja kedudukannya yang diakui, melainkan peran penjaminan mutu pendidikan pun dibebankan kepada madrasah. Hal tersebut jelas dalam amanat Bab IV Pasal 5, misalnya. Pada bab dan pasal tersebut, dijelaskan bahwa "Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (UUSPN, 2006).

Undang-Undang tersebut dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Bab XV Pasal 91 ditegaskan bahwa "Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal, wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan". Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan, 2009).

Lahirnya PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, memberikan peluang yang besar kepada Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya madrasah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap madrasah. Itu semua bukan saja karena fungsinya dalam pengembangan intelektual peserta didik semata, akan tetapi ekspektasi tersebut terletak pada penanaman nilai-nilai agama.

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab masih perlunya peningkatan mutu madrasah. Misalnya persoalan manajemen kepemimpinan madrasah, proses pembelajaran, kualitas lulusan, dan belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di madrasah. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan hingga kini masih menemui banyak tantangan dan belum begitu menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan.

Hal itu disebabkan antara lain: masalah manajemen pendidikan yang kurang tepat, penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (termasuk di dalamnya pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang kurang profesional), kurangnya pemerataan kesempatan dan keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan (Pendi Susanto, 2016).

Aktifitas pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan spirit Islam, yaitu suatu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai Islami. Selanjutnya spirit tersebut digunakan sebagai pedoman hidup. Spirit Islam ini berakar dalam teks-teks suci Al-Qur'an yang disampaikan Allah kepada Muhammad SAW. Sebagai Kitab Suci agama Islam, Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai 'pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus' (QS. 17: 19), petunjuk-petunjuknya bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut. Rosul sebagai penerima Al-Qur'an bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut, menyucikan dan mengajarkannya kepada manusia (QS 67: 3). Menyucikan dapat diidentikan dengan mendidik (menjadikan seseorang bersih/suci), sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi jiwa anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam fisik dan metafisik.

Menurut laporan *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018* Secara umum dijelaskan, meskipun mutu pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah (MA) masih berada di bawah SMA, tetapi berdasar hasil PISA (Reading) dalam tiga kali putaran perkembangan mutu siswa madrasah menunjukkan daya saing lebih tidak kalah dengan siswa sekolah umum, bahkan untuk Jenjang MTs cenderung meningkat di atas SMP (Syahidah Izzata Sabiila, n.d.). Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk adanya kesamaan regulasi, kesamaan program, dan kesamaan anggaran.

Meskipun untuk kesamaan anggaran sampai sekarang masih belum sama unit cost siswa madrasah (terutama swasta) dan sekolah umum. Siswa sekolah umum mendapatkan unit *cost* pendidikan lebih besar dari pada siswa madrasah swasta. Disparitas Mutu Pembelajaran Siswa di Madrasah Negeri dan Swasta masih terjadi. Madrasah Negeri cenderung lebih “bermutu” dari pada Madrasah Swasta. Sementara itu, Jumlah Madrasah Negeri hanya 5% dari total 50.000 madrasah di Indonesia.

Dalam kaitan pendidikan Islam di Indonesia diwarnai oleh dua orang tokoh pendidikan yakni K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asyhari yang sama-sama berguru kepada Syeh Ahmad Khatib. K.H. Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. KH Hasyim Asyari merupakan seorang ulama sekaligus Pahlawan Nasional yang pada tanggal 31 Januari 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama (NU). Selain sebagai pendiri NU, KH Hasyim Asyari juga tercatat sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. KH Hasyim Asyari juga dijuluki dengan sejumlah gelar seperti Hadratussyaikh yang artinya Maha Guru, hingga Syaikhul Masyayikh atau Gurunya Para Guru.

Menurut Ahmadi Syukran Nafis, (2012) pendidikan Islam harus memenuhi 4 tuntutan sebagai berikut; (a) kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah operasional di dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, (b) memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya, (c) meningkatkan dan memperbaiki Manajemen, dan (d) meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu menurut Muhib Abdul Wahab, n.d. Dosen Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN menjelaskan bahwa di Indonesia terjadi polarisasi yang cenderung dikotomistik antara tiga lembaga pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah. Dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta juga kerap kali memunculkan semacam kelas sosial dan kualitas tertentu. Pada saat yang

bersamaan, sistem pendidikan di tanah air mengalami semacam despiritualisasi pelemahan dan penajuhan nilai-nilai spiritual dari konsep dan praktik pendidikan, sehingga pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan multicultural, dan sebagainya sulit terbangun dan dikembangkan.

Pendidikan Barat yang seringkali dinilai telah berkembang pesat dan maju cenderung tidak bervisi pemajuan peradaban, tetapi berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan fisik melalui penyiapan SDM yang memiliki kompetensi professional atau mampu bekerja secara professional. Karena itu, reformulasi pendidikan Islam holistik dan integrative (filsafat dan epistemology yang mendasarinya, tujuan dan visi misinya, pengembangan kurikulum, dan proses pembelajarannya) dengan visi pemajuan peradaban Islam menjadi sangat penting.

Menurut Slamet (2010) penyebab perkembangan pendidikan tidak merata dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: 1.) Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang sering berubah dan tidak konsekuen dalam penerapannya; 2.) Penyelenggaraan pendidikan yang tersentral di pusat, sehingga segala kebijakan tentang pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat; dan 3.) Kesadaran kerjasama dalam membangun sekolah sangat kurang, yang meliputi kerjasama pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher, menuturkan enam aspek yang wajib diperhatikan pemerintah. Aspek-aspek ini membutuhkan perbaikan dan persiapan, jika ingin peningkatan mutu ponpes dan madrasah terwujud. Pertama dari aspek kelembagaan, selama ini belum maksimal, pusat maupun daerah sangat perlu bergerak linier dengan kementerian teknis, agar peningkatan itu bisa terwujud. Penguatan kelembagaan sangat perlu untuk melihat sikap pemerintah kepada pondok pesantren dan madrasah yang memiliki tanggung jawab besar, terutama menyiapkan masa depan bangsa. Kedua adalah konsep harus dipikirkan matang-matang terutama apa yang hendak dituju dengan keberadaan pondok pesantren dan madrasah. Ketiga adalah sarana dan

prasarana harus mampu mendukung kebutuhan dan keberadaan lembaga pesantren dan madrasah, yang bertugas melanjutkan dakwah dan mencari pasar kerja. Keempat, ketersediaan tenaga kependidikan, baik tenaga penunjang maupun tenaga inti yaitu pengajar atau guru. mereka perlu sertifikasi dan pemerintah harus mampu menyediakan itu untuk lembaga-lembaga pendidikan, agar secara baik kualitas yang ada dapat benar-benar terukur dan terstruktur. Kelima, harus dilihat berapa dana yang bisa dialokasikan pemerintah untuk peningkatan mutu pondok pesantren dan madrasah. Terakhir, harus dilihat berapa besar perhatian pemerintah atas kesejahteraan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta, yang beberapa tahun terakhir malah dirasa menurun kesejahteraannya.

Dari urain tersebut di atas aspek kelembagaan masih menjadi isu strategis di Indonesia. Perilaku primordial dan oligarkis masih mewarnai pemimpin kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia. Walaupun dilihat dalam perspektif manajemen perilaku primordialisme dan oligarkis bermanfaat untuk memperkuat pimpinan terhadap loyalitas bawahannya (yang *notabene* merupakan keluarga dekat dan seiman seagama), juga untuk meningkatkan moral, dan patriotisme serta kesejahteraan keluarga, namun sikap primordialisme juga banyak memberikan dampak negatif yang dapat memicu konflik yang tentunya merugikan individu atau kelompok lain. Sikap ini sangat menghambat proses pengembangan kualitas diberbagai bidang kelembagaan.

Pendidikan Islam holistik, integratif dan komprehensif menjadi keharusan untuk dipikirkan dan setidaknya ada kerjasama yang berkesinambungan antara pusat dan daerah dengan Lembaga Pendidikan dalam menggali dan meningkatkan mutu Pendidikan Islam di masing-masing Lembaga dengan mengusung nafas Islam yang adil, amanah dan terpercaya.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam ideal adalah membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi

sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional dan intelegensia secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran.

Mutu Pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* baik internal (peserta didik, pendidik, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) maupun eksternal (calon peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri), dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan.

Penyebab perkembangan pendidikan tidak merata dipengaruhi oleh tiga faktor utama berikut: (1). Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang sering berubah dan tidak konsekuen dalam penerapannya; (2). Penyelenggaraan pendidikan yang tersentral di pusat, sehingga segala kebijakan tentang pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat; dan (3). Kesadaran kerjasama dalam membangun sekolah sangat kurang, yang meliputi kerjasama pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2010). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani.
- Ahmadi Syukran Nafis. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta. LaksBang PressIndo.
- EMIS Kementerian Agama mengenai data statistik Pendidikan Agama 2019/2020. Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan. (2009).
- Muhbib Abdul Wahab. (n.d.). *Pengembangan Pendidikan Islam Holistik Integratif Bervisi Pemajuan Peradaban*. Dosen Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN.
- Pendi Susanto. (2016). *Produktivitas Sekolah, Teori dan Praktik di Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Prasko. (n.d.). *No Title*. <http://prasko17.blogspot.com/2012/08/pengertian-mutu-menurut-para-ahli-dan.html>
- Republika.co.id. (n.d.). *No Title*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/21/oijed2301-ini-6-aspek-penting-peningkatan-mutu-ponpes-dan-Madrasah>
- Slamet. (2010). *Pemikiran Tokoh Ilmu dan Konsep Manajemen (Sebuah Kajian dan Rekonstruksi Kritis Manajemen Dalam Kontek Islam)*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Syahidah Izzata Sabiila. (n.d.). *No Title*. <https://news.detik.com/berita/d-5993895/teks-undang-undang-dasar-1945-pembukaan-hingga-maknanya>
- UUSPN. (2006). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*.